

Analisis Faktor Pengungkapan Laporan Keberlanjutan di Indonesia

Tri Siwi Nugrahani¹; Ismiyati Nur Rohmah²

¹²Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

*Corresponding author: trisiwi@upy.ac.id

Received: 14 Juni 2023

Revised: 26 Juni 2023

Accepted: 28 Juni 2023

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia yaitu faktor format laporan, pedoman, jaminan, size dan sektor industri.

Metodologi: Sampel penelitian ini 364 perusahaan publik yang listing di IDX tahun 2017-2020 dengan metode sampel secara purposive dengan kriteria yaitu: 1) perusahaan terdaftar di IDX selama tahun 2017-2020; 2) perusahaan menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun tersebut, 3) perusahaan mengunggah laporan di website. Sumber data penelitian dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama tahun 2017-2020. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Temuan: Penelitian ini membuktikan bahwa variabel format laporan dan jaminan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan variabel pedoman standar, size, dan sektor industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Orisinalitas: Pengujian faktor penentu pengungkapan laporan keberlanjutan dengan menguji dari variabel yang bersifat kategorikal (format, pedoman, dan jaminan) dan menggunakan variabel kontinyu (asset dan sektor industri).

Keterbatasan Penelitian: Studi ini dibatasi pada laporan keberlanjutan dengan menggunakan pedoman GRI, yang kemungkinan akan mendapat hasil yang beda jika menggunakan ketentuan pengukuran laporan keberlanjutan lain, seperti ESG. Studi ini tidak berdasar sektor tertentu atau yang lain.

Implikasi Praktis: Studi ini dapat digunakan sebagai persiapan perusahaan atas kepatuhan regulasi dalam menyusun laporan keberlanjutan.

Kata kunci: laporan keberlanjutan, format laporan, pedoman, jaminan

UBMJ

UPY Business and
Management Journal

DOI:

Pendahuluan

Laporan keberlanjutan adalah topik yang hangat diperdebatkan dan dieksplorasi dalam bisnis dan ekonomi. Tujuan perusahaan menyusun laporan keberlanjutan adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan terkait aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu pelaporan keberlanjutan bertujuan mendukung program Persatuan Bangsa (PBB) yaitu untuk pembangunan berkelanjutan sebagai tanggung jawab bisnis kepada karyawan komunitas lokal, dan masyarakat secara umum dan untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan (Trihatmoko, Ningsih, & Mubaraq, 2020). Laporan keberlanjutan memuat gambaran perusahaan atas dampak lingkungan yang terjadi dan memuat tanggung jawab perusahaan atau pelaporan CSR sebagai fitur mendasar dari laporan tahunan perusahaan di baik di negara maju maupun berkembang. Seluruh negara yang tergabung

dengan anggota PBB sepakat untuk menyusun laporan keberlanjutan baik secara terpisah dari laporan tahunan maupun tergabung (OJK RI, 2017).

Laporan keberlanjutan saat ini mengalami peningkatan dari jumlah karena pemerintah juga mendorong agar perusahaan mendukung program roadmap keuangan berkelanjutan, meskipun kualitas pengungkapan keberlanjutan masih perlu ditinjau lagi. Secara umum laporan keberlanjutan banyak disusun oleh perusahaan besar dibanding perusahaan kecil. Laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan terikat dengan informasi operasi yang tergantung pada sumber daya alam (Nugrahani & Artanto, 2022). Ketentuan tentang pengungkapan informasi dari operasi sumber daya alam diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 (Republik Indonesia, 2007) dan UU No. 32 Tahun (2009) (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) yang memuat kewajiban perusahaan untuk melaksanakan strategi tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan keberlanjutan banyak mendapat perhatian di beberapa negara seperti di Peru, Italia, Inggris juga di Indonesia dan beberapa di negara lain (Adaui, 2020; Badia, Bracci, & Tallaki, 2020; Michelin, Patten, & Romi, 2019;) serta negara lain. Beberapa temuan di berbagai negara menekankan bahwa perusahaan harus meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penyusunan laporan keberlanjutan memiliki dua format yaitu laporan yang disusun secara terpisah dari laporan tahunan dan laporan yang tergabung dengan laporan tahunan dalam mengungkapkan informasi terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan keberlanjutan sebagai instrumen yang sangat baik untuk mengkomunikasikan tantangan sosial dan lingkungan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan (Nasution & Adhariani, 2016). Menurut Mahoney, *et al.*, (2013) laporan keberlanjutan yang terpisah lebih fokus pada pembahasan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dibanding tergabung, namun Michelin, *et al.*, (2015) tidak sependapat karena yang diutamakan adalah konten atau isi dari laporan dan bukan panjang dan pendek laporan (Lock & Seele, 2016). Apabila perusahaan menyusun laporan keberlanjutan, maka dapat meningkatkan tanggung jawab dan reputasi (Rudyanto & Siregar, 2018).

Penyusunan laporan keberlanjutan perlu memperhatikan dengan pedoman yang digunakan sebagai acuan seperti menggunakan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) yang dikenal sebagai standard internasional dalam menyusun laporan keberlanjutan, karena pedoman GRI menggambarkan pengungkapan perusahaan yang menginformasikan tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan sebagai alat komunikasi (Mahoney *et al.*, 2013). Selain itu dalam menyusun laporan keberlanjutan diperlukan jaminan. Menurut Adams & Evans, (2014) untuk memastikan kredibilitas pengungkapan laporan keberlanjutan perlu menggunakan jaminan eksternal untuk memverifikasi laporan sesuai standar dan prinsip serta fokus terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan adalah kepemilikan aset perusahaan karena aset sebagai alat strategi perusahaan. Perusahaan perlu menjaga keseimbangan atas aset yang digunakan dengan pengeluaran yang mendukung kegiatan perusahaan termasuk dalam penyusunan laporan keberlanjutan, seperti informasi tentang ekonomi, sosial dan lingkungan, karena keseimbangan antara keuangan dan non keuangan adalah capaian kinerja yang baik (Aras & Crowther, 2009) dan jaminan juga dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan (Adaui, 2020). Jaminan dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan termasuk dalam pengungkapan laporan keberlanjutan (Nasution & Adhariani, 2016; Wong & Millington, 2014). Selain itu sektor industri perusahaan juga berperan dalam penyusunan laporan keberlanjutan (Fernandez-Feijoo, *et al.*, 2014) karena sektor industri memiliki karakteristik sendiri. Sektor industri dapat berdasar industri peka lingkungan atau dapat berdasar ketentuan bursa saham (Rudyanto & Siregar, 2018). Sektor industri memiliki karakteristik sendiri sehingga kemungkinan dalam penilaian laporan keberlanjutan juga dapat berbeda, terlebih sektor industri yang terkait dengan lingkungan yang kemungkinan akan memberikan dampak yang lebih kuat terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian ini tentang pengungkapan laporan keberlanjutan yang penting dilakukan karena beberapa alasan; (1) perusahaan di Indonesia belum banyak yang menerbitkan laporan

keberlanjutan (Adhariani & du Toit, 2020); (2) standar pedoman pelaporan lebih luas dan tidak sebatas pada kinerja keuangan namun juga kinerja non keuangan (Emeseh & Songi, 2014); (3) masih terdapat hasil yang inkonsisten dari beberapa penelitian seperti (Anugerah, *et al.*, 2018; Mahoney *et al.*, 2013; Nasution & Adhariani, 2016) dalam menguji penentu pengungkapan laporan keberlanjutan seperti format laporan, termasuk pedoman dan standar (Michelon *et al.*, 2015) dan jaminan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu diperlukan pengujian kembali studi penentu pengungkapan laporan keberlanjutan yang perlu ditambahkan dengan pengujian pada asset (Nugrahani, *et al.*, 2022) apakah memiliki pengaruh atau tidak pada pengungkapan laporan keberlanjutan dan karakteristik industri (Adaui, 2020) sehingga dapat diketahui sektor apa yang paling memiliki kepatuhan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Pengujian tambahan aset dan sektor industri akan dapat digunakan sebagai masukan untuk perusahaan atas efektivitas penggunaan aset dari tiap sektor industri.

Tinjauan Pustaka

Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui motivasi perusahaan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Menurut Deegan (2019), legitimasi masyarakat sangat penting dan menjadi faktor utama untuk perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus bisa meyakinkan masyarakat terkait dengan aktivitas perusahaan yang sesuai aturan dan batasan dimana perusahaan berada (Deephouse, *et al.*, 2018). Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan yang baik adalah laporan yang mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan (Kurniawan & Wahyuni, 2018). Perusahaan juga harus memastikan pelaporan tanggung jawab lingkungan atas aktivitas perusahaan dalam laporan keberlanjutan sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi dan meningkatkan kredibilitas perusahaan (Trihatmoko *et al.*, 2020). Jika ada kesenjangan yang terus membesar antara kegiatan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dapat kehilangan legitimasi dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Adaui, 2020a; Michelon *et al.*, 2015).

Laporan Keberlanjutan

Menurut peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 51/03/2017 (OJK RI, 2017) bahwa perusahaan harus memperhatikan penyusunan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Pengertian laporan keberlanjutan adalah laporan perusahaan yang mengungkapkan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan serta tata kelola secara akuntabel kepada pemangku kepentingan. Penyajian laporan keberlanjutan terbagi menjadi 2 jenis yaitu laporan keberlanjutan yang tergabung dengan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri atau terpisah. Menurut Adhariani & du Toit, (2020) tujuan perusahaan menyusun laporan keberlanjutan adalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi informasi pemangku kepentingan dan membantu pemerintah dalam road map keuangan berkelanjutan.

Format Laporan Keberlanjutan

Format Laporan Keberlanjutan adalah laporan keberlanjutan yang disusun secara terpisah atau tergabung dengan laporan tahunan. Menurut Mahoney *et al.*, (2013) dan Nasution & Adhariani, (2016), laporan keberlanjutan yang disusun terpisah dari laporan keuangan tahunan lebih fokus pada isu-isu keberlanjutan dan memperjelas tanggung jawab perusahaan. Format laporan terpisah dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dengan memberikan informasi yang lebih rinci dan transparan tentang dampak keberlanjutan perusahaan (Cho, Michelon, & Patten, 2012;

Patten & Zhao, 2014) yang dapat membantu perusahaan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang masalah keberlanjutan dan meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan. karena memberikan informasi yang lebih rinci dan transparan tentang dampak keberlanjutan perusahaan. Format laporan keberlanjutan menunjukkan cara perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan (Cho, *et al.*, 2015). Perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan format terpisah lebih baik daripada dengan format tergabung dengan laporan tahunan (Helfaya & Moussa, 2017; Mahoney *et al.*, 2013; Nasution & Adhariani, 2016) yang dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan (Trihatmoko *et al.*, 2020). Namun menurut Lock & Seele, (2016) dan Michelon *et al.*, (2015) bukan hanya format laporan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, tetapi yang lebih utama adalah konten sehingga tidak ditentukan dari terpisah atau tergabung termasuk panjang dan pendek laporan keberlanjutan tetapi isi dari pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih penting, sehingga secara legitimasi format laporan dapat mempengaruhi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, maka pengajuan hipotesis 1 adalah:

H1: Format laporan berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keberlanjutan

Pedoman dengan *Global Reporting Initiative (GRI)*

Pedoman GRI secara luas diakui sebagai standar pengungkapan laporan keberlanjutan internasional yang banyak digunakan dalam menyusun laporan keberlanjutan (Michelon *et al.*, 2015). Pedoman GRI mengatur perusahaan untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai kerangka kerja bagi perusahaan untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan mereka. Perusahaan yang telah mengadopsi Pedoman GRI cenderung lebih aktif dalam melaporkan kegiatan dan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut (Bukhori & Sopian, 2017). Temuan Trihatmoko *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pedoman GRI berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pedoman GRI sebagai acuan untuk perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan, sehingga perusahaan harus memahami dari konten pedoman GRI karena secara legalitas ketentuan penyusunan laporan keberlanjutan telah diatur sesuai dengan pedoman GRI. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan dengan cara memenuhi harapan dan tuntutan mereka. Pedoman GRI dapat membantu perusahaan memenuhi harapan dan tuntutan pemangku kepentingan dengan memberikan kerangka kerja untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan perusahaan. Berdasarkan pendekatan teori legitimasi hipotesis kedua yaitu:

H2: Pedoman GRI berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Jaminan

Jaminan adalah keberadaan pihak yang secara independen untuk melakukan pengesahan atas laporan keberlanjutan (Mahoney *et al.*, 2013; Nasution & Adhariani, 2016). Jaminan ditunjukkan dengan kepemilikan komite audit yang secara independen diperlukan untuk memastikan kredibilitas laporan yang dapat meyakinkan pemangku kepentingan (Adaui, 2020a; Michelon *et al.*, 2015; Buallay & Al-Ajmi, 2020). Salah satu elemen kunci untuk memastikan kredibilitas laporan keberlanjutan adalah laporan keberlanjutan yang dijamin oleh komite audit dalam melakukan proses verifikasi yang secara independen sesuai standar dan prinsip jaminan serta fokus terhadap kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan (Adams & Evans, 2014). Komite audit sebagai jaminan yang memadai kepada pemangku kepentingan menjaga kredibilitas dan kelengkapan terhadap informasi sosial dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan (Michelon *et al.*, 2015).

Jaminan dapat memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa laporan keberlanjutan

yang disusun telah memenuhi standar tertentu. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan mereka. Jaminan digunakan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai praktik pengungkapan laporan keberlanjutan yang bersifat substantif (Nasution & Adhariani, 2016; Patten & Zhao, 2014; Wong & Millington, 2014). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan dengan cara memenuhi harapan dan tuntutan mereka. Jaminan dapat membantu perusahaan mempertahankan legitimasi dengan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah memenuhi standar yang berlaku. Berdasarkan pendekatan teori legitimasi hipotesis yang diajukan yaitu:

H3: Jaminan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Asset

Asset adalah sejumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Aset merupakan sumber perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Beberapa studi dahulu sudah menguji asset yang mempengaruhi laporan keberlanjutan, seperti studi (Khan, *et al.*, 2020) menguji asset dengan memiliki pengaruh pada penyusunan laporan keberlanjutan yang diuji pada sektor perbankan di Banglades, dan studi (Adai, 2020) menguji asset yang memiliki pengaruh pada penyusunan laporan keberlanjutan yang diuji pada perusahaan publik di Peru. Menurut Wulandari & Septiani, (2017) size sebagai salah satu ukuran kinerja perusahaan, dimana perusahaan secara umum lebih banyak mengungkapkan informasi tentang aset (Afsari, *et al.*, 2017). Asset menjadi pengukuran kinerja perusahaan yang terkait secara langsung maupun tidak dengan penyusunan laporan keberlanjutan (Nugrahani *et al.*, 2022). Menurut Rudyanto & Siregar, (2018), asset dapat mempengaruhi perusahaan dalam penyusunan laporan keberlanjutan, demikian pula secara legitimasi karena perusahaan tidak dapat berjalan tanpa ada pengelolaan asset yang baik, maka hipotesis 4 adalah:

H4: Aset berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Sektor Industri

Sektor industri adalah jenis industri yang ada di perusahaan. Menurut (Adai, 2020b) sektor industri merupakan karakteristik industri yang dapat tergolong dalam kepekaan lingkungan atau tidak, sedangkan menurut Beberapa studi dahulu yang menguji sektor industri mempengaruhi penyusunan laporan keberlanjutan, diuji oleh Fernandez-Feijoo *et al.*, (2014); Lock & Seele, (2016); Qisthi & Fitri, (2020) dan Rudyanto & Siregar, (2018) dengan hasil membuktikan bahwa sektor industri memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pembagian sektor industri dalam studi ini ditentukan berdasar ketentuan IDX yang dapat mempengaruhi laporan keberlanjutan, seperti studi dahulu yang dilakukan oleh Rudyanto & Siregar, (2018). Sektor industri perusahaan memiliki ketentuan dalam konsekuensi penyusunan dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasar teori legitimasi, perusahaan akan memberikan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan termasuk sesuai dengan sektor industri sehingga pengajuan hipotesis 5 adalah:

H5: Sektor industri berpengaruh secara positif pada pengungkapan laporan keberlanjutan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 731 perusahaan yang listing di IDX, sedangkan sampel penelitian adalah 91 perusahaan yang mengungkapkan perusahaan selama tahun 2017-

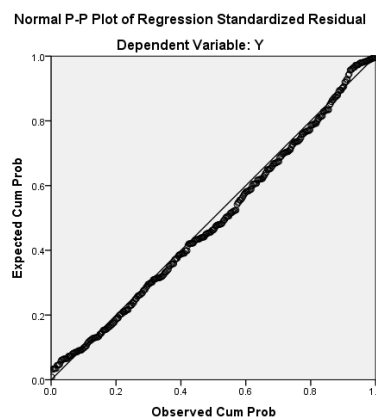
2020 sehingga total sampel 364 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Kriteria sampel antara lain: perusahaan terdaftar di IDX mulai 2017-2020 dan menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2017-2020. Data penelitian diperoleh dengan metode dokumentasi dan observasi melalui website masing-masing perusahaan dan dari IDX. Sumber data dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan selama tahun 2017-2020. Teknik analisa data dengan menggunakan regresi berganda dengan seignifikansi 5%. Adapun metode penelitian yaitu: 1) uji asumsi klasik untuk mengetahui syarat uji tregresi, 2) perumusan model, dan 3) pengukuran variabel. Adapun rincian metode penelitian sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Studi ini juga menguji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ketentuan dalam pengujian regresi terpenuhi atau tidak. Adapun pengujian asumsi klasik sebagai berikut.

a. Uji Normalitas.

Tujuan menguji normalitas untuk memastikan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas secara grafik menunjukkan data terdistribusi normal mendekati garis regresi, dengan grafik sebagai berikut:



Grafik 1. Uji Normalitas

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan ada korelasi antar variabel independen atau tidak dengan melihat nilai *Variance Infflance Factor* (VIF) dari model regresi, apabila nilai VIF < 10 berarti tidak terjadi multikolinieritas (Hair et al., 2014).

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tipe Variabel	Tolerance	VIF
X1 Format Laporan	Independen	0,162	6,167
X2 Pedoman GRI	Independen	0,254	3,944
X3 Jaminan	Independen	0,353	2,833
X4 Size	Independen	0,815	1,277
X5 SEktor Industri	Independen	0,902	1,108

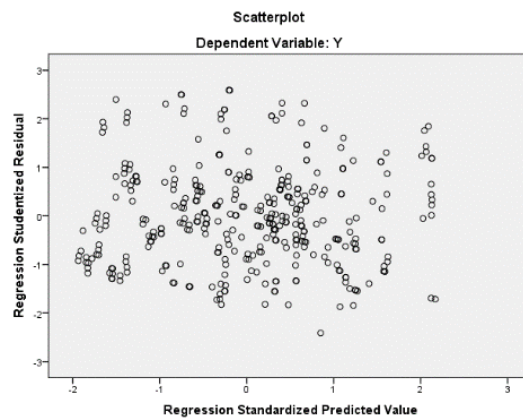
Sumber: Data diolah (2023)

Hasil uji multikolinieritas dari Tabel 4.12 menunjukkan nilai VIF yaitu < 10 dan > 1 berarti seluruh variabel prediktor tidak saling berpengaruh satu dengan yang lain.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* dengan melihat ada atau tidak pola tertentu pada Grafik antara

SRESID dan ZPRED. Apabila titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa menunjukkan pola tertentu, berarti data terbebas dari homokedastisitas. Hasil uji sebagai berikut.



Grafik 2. Uji Heterokedastisitas

Berdasar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y dan tidak menunjukkan pola tertentu (melebar, bergelombang atau menyempit), maka penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas.

2. Uji Regresi

Setelah pengujian normalitas, kemudian dilakukan pengujian regresi sesuai dengan variabel yang telah ditentukan dalam mengukur variabel tersebut. Adapun variabel penelitian terdiri dua yaitu variabel terikat (Y) berupa pengungkapan laporan keberlanjutan dan variabel bebas terdiri dari: format laporan (X1), pedoman GRI (X2), jaminan (X3), size atau ukuran perusahaan (X4) dan sektor industri (X5). Teknik analisis data dengan regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan uji t signifikansi 5%. Adapun model penelitian sebagai berikut:

$$SR = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 X4 + \beta_5 X5 + \epsilon$$

Keterangan:

- α = Koefisien konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien variabel bebas
- X1 = Format laporan keberlanjutan
- X2 = Pedoman GRI
- X3 = Jaminan
- X4 = Size atau ukuran Perusahaan
- X5 = Sektor industri
- ϵ = error

3. Pengukuran Variabel

Adapun definisi dan pengukuran dari tiap variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Definisi Variabel dan Pengukuran
Pengungkapan laporan keberlanjutan	Variabel Terikat	Pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu perusahaan mengungkapkan informasi ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan GRI. Pengukuran laporan keberlanjutan yaitu dengan skor 1 jika ada pengungkapan laporan keberlanjutan dan 0 jika tidak, kemudian total dari yang diungkapkan

		dibagi dengan seluruh ketentuan pengungkapan laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman GRI. Pengungkapan aspek ekonomi yaitu 9 item ekonomi, 34 item lingkungan, dan 48 item sosial. Total 91 item.
Format laporan keberlanjutan terpisah atau <i>Standalone report</i>	Variabel Bebas	Format laporan keberlanjutan terpisah atau <i>Standalone report</i> adalah penyusunan laporan keberlanjutan secara terpisah dengan laporan keuangan tahunan. Pengukuran dengan menggunakan skor 1 apabila perusahaan menyusun laporan keberlanjutan secara terpisah dan skor 0 jika tergabung dengan laporan tahunan. Sumber pengukuran dari Mahoney <i>et al.</i> , (2013)
Pedoman penyusunan laporan keberlanjutan	Variabel Bebas	Pedoman penyusunan laporan keberlanjutan yaitu menggunakan pedoman dari GRI dalam menyusun laporan keberlanjutan. Pengukuran: menggunakan dummy yaitu bernilai 1 apabila laporan keberlanjutan dengan menggunakan pedoman standar GRI dan skor 0 jika tidak. Sumber pengukuran pedoman dari Mahoney <i>et al.</i> , (2013)
Jaminan	Variabel Bebas	Jaminan laporan keberlanjutan yaitu memiliki komite audit sebagai penjamin dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Pengukuran: dengan menggunakan dummy yaitu bernilai 1 apabila laporan keberlanjutan sudah mempunyai pernyataan jaminan dari assurance report, dan bernilai 0 apabila sustainability report perusahaan belum dijamin oleh assurance report (Buallay & Al-Ajmi, 2020)
Size	Variabel bebas	Size adalah asset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran : Logaritma Natural Asset yang dimiliki perusahaan (Rudyanto & Siregar, 2018)
Sektor industri	Variabel bebas	Sektor industri adalah jneiz industri perusahaan dengan karateritik tertebtu ((Adaui, 2020)

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menggunakan sampel 364 perusahaan dengan metode penentuan secara purposive sampling, adapun hasil dari penentuan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Sektor	Jumlah
1	Jumlah perusahaan yang terdaftar IDX	737
2	Jumlah perusahaan yang menyusun laporan tahunan	730
3	Jumlah perusahaan yang tidak menyusun laporan keberlanjutan	646
4	Laporan keberlanjutan yang menyusun laporan tahunan	91
5	Laporan selama tahun 2017-2020 (4 tahun)	*4
Total sampel penelitian		364

Sumber: Data diolah (2023)

Adapun berdasar sektor Sampel penelitian ini menggunakan sektor industri berdasar IDX yaitu terdapat 11 sektor. Adapun masing-masing sektor selama tahun 2017-2020 yang menyusun

laporan keberlanjutan sesuai dengan kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 4. Data Penelitian berdasar sektor industri

No	Sektor	Jumlah	Sampel Penelitian
1	Material/Bahan Baku	89	14
2	Barang Konsumen Non-Primer	122	5
3	Barang Konsumen Primer	91	14
4	Energi	67	14
5	Keuangan	106	14
6	Kesehatan	22	5
7	Perindustrian	51	6
8	Infrastruktur	57	10
9	Properti dan Real Estate	79	5
10	Teknologi	26	1
11	Transportasi dan logistik	27	3
Jumlah		737	91
Selama tahun 2017-2020 (4 tahun)			*4
Total Sampel yang digunakan			364
No	Sektor	Jumlah	%n
1	Material/Bahan Baku	56	15.4

Sumber: (Data diolah, 2023)

Terdapat total sampel 364 perusahaan yang terdiri dari 11 sektor.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Studi ini menggunakan variabel dengan berdasar data metrik dan non metric dalam pegujian regresi. Adapun statistik deskriptif dalam data metrik sebagai berikut:

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Model	Mean	St dev	Median	Minimum	Maximum
Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Y) Size(X4)	0,224	0,113	0,219	0,011	0,505
	16,459	1,449	16,466	12,592	20,317

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil Tabel 5 dapat ditunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan publik yang listing di IDX selama tahun 2017-2020 yaitu 22,40% yang menunjukkan masih rendah, maka perlu dilakukan sosialisasi lagi pada perusahaan agar mempersiapkan penyusunan laporan keberlanjutan, sedangkan aset yang diukur dari logaritma natural menunjukkan rata-rata 1645,90% yang digunakan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Adapun statistik dari data variabel non metrik yaitu format laporan, pedoman, jaminan, dan sektor industri berdasar frekwensi sebagai berikut:

Tabel 6. Deskripsi Variabel Kategorikal Format Laporan

Variabel	Frekwensi	%
Terpisah (stand alone)	145	39,80%
Tergabung (integrated)	219	60,20%
Total	364	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 6 dapat ditunjukkan perusahaan publik banyak yang menyusun laporan keberlanjutan dengan format tergabung yaitu 60, 20% atau 219 perusahaan. Apabila dilihat

berdasar penyusunan laporan keberlanjutan dengan ketaatan pedoman GRI, dapat ditunjukkan bahwa masih 59,30% perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang dilihat di Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Frekwensi Pedoman GRI

Variabel	Frek	%
Pedoman GRI	148	40,70%
Tanpa Pedoman GRI	216	59,30%
Total	364	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Apabila ditinjau berdasar jaminan, maka dapat ditunjukkan bahwa perusahaan hampir sama antara yang menggunakan jaminan (49,5%) dan yang tidak menggunakan jaminan (50,5%). Artinya perusahaan telah banyak yang menggunakan komite audit yang diasumsikan sebagai penjamin dalam menyusun laporan keberlanjutan (Adaui, 2020). Adapun jaminan dapat ditunjukkan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Jaminan Laporan Keberlanjutan

Variabel	Frekw	%
Ada jaminan	180	49.5
Tidak adajaminan	184	50.5
Total	364	100.0

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasar sektor industri dapat ditunjukkan dalam tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasar Sektor Industri

No	Sektor	Frek	%
1	Basic / Material Dasar	56	15,40%
2	Barang Konsumen Non-Primer/Non cycliclas	56	15,40%
3	Barang Konsumen Primer/Cyclicals	20	5,50%
4	Energi/energy	56	15,40%
5	Keuangan	56	15,40%
6	Kesehatan/healthcare	20	5,50%
7	Perindustrian/industrial	24	6,60%
8	Infrastruktur	40	11,00%
9	Properti dan Real Estat/property	20	5,50%
10	Teknologi	4	1,10%
11	Transportasi dan logistic/transportation	12	3,30%
Jumlah		364	

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 9 menunjukkan paling sedikit 1,10% sektor teknologi yang mengungkapkan laporan keberlanjutan, untuk paling tinggi sejumlah 15,40% dari sektor basic, non-cyclicals, keuangan dan energy. Secara keseluruhan dari 11 sektor perusahaan yang listing di IDX sudah memperhatikan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat ditunjukkan dalam Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Keterangan
Constant	0,124	1,896	0,059	
Format laporan (X1)	0,028	2,473	0,014	H ₁ : Didukung
Pedoman GRI (X2)	0,022	1,094	0,275	H ₂ : Tidak didukung
Jaminan (X3)	0,018	2,336	0,020	H ₃ : Didukung
Size (X4)	0,004	0,895	0,371	H ₄ : Tidak didukung
Sektor Industri (X5)	-0,007	-3,907	0,000	H ₅ : Tidak didukung
F	= 12,888			
Prob	= 0,000			
Adj R ²	= 0,141			

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan t-hitung variabel format laporan sebesar 2,473 dengan signifikan $0,014 < 0,05$. Hasil hipotesis pertama membuktikan bahwa format laporan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sejalan dengan temuan Mahoney et al., (2013) dan Nasution & Adhariani, (2016) yang menunjukkan bahwa format laporan terpisah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih relatif baru dan belum terlalu banyak perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan yang terpisah. Namun, apabila perusahaan menyusun laporan tergabung juga diperbolehkan karena menurut POJK penyusunan laporan keberlanjutan dapat dilakukan secara terpisah dan tergabung (OJK, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa format laporan keberlanjutan secara terpisah memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan sesuai dengan teori legitimasi bahwa laporan keberlanjutan yang diatur dengan format yang sudah ditentukan bersifat legal yang dapat digunakan untuk acuan menyusun laporan keberlanjutan.

Apabila ditinjau berdasar ketaatan dengan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan yaitu GRI, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan karena t-hitung variabel pedoman GRI sebesar 1,094 dengan signifikan $0,275 > 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan pedoman GRI tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil ini sejalan dengan temuan (Anugerah et al., 2018) yang menunjukkan penggunaan pedoman GRI tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Pedoman GRI tidak menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi harapan dan tuntutan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memperbaiki kinerja dan memenuhi harapan dan tuntutan pemangku kepentingan untuk mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman GRI tidak berhasil mendukung teori legitimasi karena pedoman GRI tidak dapat digunakan sebagai acuan secara legal karena perusahaan masih banyak yang tidak menggunakan pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutan.

Tabel 10 menunjukkan t-hitung variabel jaminan sebesar 2,336 dengan signifikan $0,020 < 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa jaminan eksternal berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Jaminan eksternal yaitu keberadaan komite audit berguna untuk memastikan kredibilitas laporan keberlanjutan yang mampu meyakinkan pemangku kepentingan (Adams & Evans, 2014; Utama, 2011). Jaminan eksternal akan memastikan laporan keberlanjutan akurat dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Manajemen perusahaan mengadopsi jaminan eksternal bersifat substantif, sehingga dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan (Nasution & Adhariani, 2016; Wong & Millington, 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan yaitu dengan kepemilikan komite audit mampu memengaruhi penyusunan laporan keberlanjutan, dan sesuai dengan teori legitimasi bahwa jaminan laporan keberlanjutan bersifat legal memiliki kekuatan untuk meningkatkan keyakinan pada penyusunan laporan keberlanjutan.

Variabel Size menunjukkan nilai t (signifikansi) sebesar 0,895 ($0,371$) yang berarti $p\text{ value} > 5\%$ maka pengajuan hipotesis 4 tidak didukung yang berarti size tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Besar kecilnya size tidak mempengaruhi laporan keberlanjutan, maka hipotesis penelitian tidak didukung yang berarti sektor industri tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sejalan dengan studi dahulu yang dilakukan oleh De Beelde & Tuybens, (2015) dan Fifka, (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa size tidak mampu meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan yang berarti size kurang memiliki kekuatan legal dalam meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Variabel Sektor industri menunjukkan nilai t (signifikansi) sebesar $-3,097$ ($0,000$) yang berarti p value $> 5\%$ maka pengajuan hipotesis 5 tidak didukung bahwa sektor industri tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil studi mendukung studi dahulu yang dilakukan Nugrahani et al., (2022) dengan nilai t sebesar $-3,907$ dan signifikan pada $0,00$, meskipun signifikan tetapi arah menunjukkan berlawanan dengan hipotesis penelitian, maka hipotesis penelitian tidak didukung yang berarti sektor industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu studi sejalan dengan studi dahulu yang dilakukan oleh Fifka (2012) dan De Beelde & Tuybens, (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor industri tidak mampu meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan yang berarti sektor industri kurang memiliki kekuatan legal dalam meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan

Hasil uji koefisien *Adjusted R square* sebesar $0,141$ artinya sebesar $14,10\%$ pengungkapan laporan keberlanjutan dipengaruhi oleh variabel format laporan, pedoman GRI, jaminan, size dan sektor industri dan sisanya sebesar $85,90\%$ dipengaruhi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai F hitung sebesar $12,888$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ menjelaskan bahwa variabel format laporan, pedoman GRI, jaminan, size dan sektor industri secara bersama-sama dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan.

Simpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa variabel format laporan keberlanjutan, dan jaminan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan variabel pedoman GRI, size dan sektor industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pengungkapan laporan keberlanjutan telah menjadi ketentuan yang berlaku untuk perusahaan yang harus mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan dalam penyusunan laporan keberlanjutan dengan memuat informasi ekonomi, sosial dan lingkungan. Studi ini dapat menunjukkan bahwa penting perusahaan untuk menerapkan pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutan supaya laporan mudah untuk dinilai karena secara seragam sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini memiliki keterbatasan; (1) pedoman yang digunakan berdasar GRI, padahal masih banyak pengukuran yang lain seperti POJK atau ESG, maka studi mendatang dapat dilakukan dengan penggunaan metode yang berbeda. (2) variabel bebas yang digunakan hanya lima yaitu format laporan, pedoman, jaminan, size dan sektor dengan nilai *Adjusted R square* hanya $14,10\%$ sehingga kemungkinan besar masih banyak faktor lain yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, maka pengujian tekanan pemangku kepentingan (Rudyanto & Siregar, 2018) untuk dilakukan pada penelitian mendatang, seperti baik tekanan internal seperti tekanan karyawan ataupun tekanan eksternal seperti tekanan investor atau kreditur Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memfokuskan perusahaan pada sektor tertentu untuk lebih detail peran sektor industri dalam pengungkapan laporan keberlanjutan.

Referensi

- Adams, C. A., & Evans, R. (2014). Accountability, Completeness, Credibility and the Audit Expectations Gap. *Journal of Corporate Citizenship*, 2004(14). <https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2004.su.00010>
- Adaui, C. R. L. (2020a). Sustainability reporting quality of peruvian listed companies and the impact of regulatory requirements of sustainability disclosures. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su12031135>

- Adhariani, D., & du Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4), 621–636. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2019-0194>
- Afsari, R., Purnamawati, I. G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan yang Mengikuti ISRA Periode 2013-2015). *Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8(2).
- Anugerah, E. G., Saraswati, E., & Andayani, W. (2018). Quality Of Disclosure And Corporate Social Responsibility Reporting Practices In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 337. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.392>
- Aras, G., & Crowther, D. (2009). Corporate sustainability reporting: A study in disingenuity? *Journal of Business Ethics*, 87(SUPPL. 1), 279–288. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9806-0>
- Badia, F., Bracci, E., & Tallaki, M. (2020). Quality and diffusion of social and sustainability reporting in Italian public utility companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su12114525>
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2020). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2018-0085>
- Bukhori, M. R. T., & Sopian, D. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.62>
- Cho, C. H., Michelon, G., & Patten, D. M. (2012). Impression management in sustainability reports: An empirical investigation of the use of graphs. *Accounting and the Public Interest*, 12(1), 16–37. <https://doi.org/10.2308/apin-10249>
- Cho, C. H., Michelon, G., Patten, D. M., & Roberts, R. W. (2015). CSR disclosure: The more things change...? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 28(1). <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2013-1549>
- De Beelde, I., & Tuybens, S. (2015). Enhancing the credibility of reporting on corporate social responsibility in Europe. *Business Strategy and the Environment*, 24(3), 190–216. <https://doi.org/10.1002/bse.1814>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Deephouse, D. L., Bundy, J., Tost, L. P., & Suchman, M. C. (2018). Organizational Legitimacy: Six Key Questions. *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, 27–52. <https://doi.org/10.4135/9781446280669.n2>
- Dilling, P. F. A. (2010). Sustainability Reporting In A Global Context: What Are The Characteristics Of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports An Empirical Analysis. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.19030/iber.v9i1.505>
- Emeseh, E., & Songi, O. (2014). CSR, human rights abuse and sustainability report accountability. *International Journal of Law and Management*, 56(2), 136–151. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2013-0001/FULL/XML>
- Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., & Ruiz, S. (2014). Effect of Stakeholders' Pressure on

- Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework. *Journal of Business Ethics*, 122(1), 53–63. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1748-5>
- Fifka, M. (2012). The development and state of research on social and environmental reporting in global comparison. In *Journal für Betriebswirtschaft* (Vol. 62). <https://doi.org/10.1007/s11301-012-0083-8>
- Hahs-Vaughn, D. L. (2016). Applied multivariate statistical concepts. In *Applied Multivariate Statistical Concepts*. <https://doi.org/10.4324/9781315816685>
- Hair, J. F., C.Black, W., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis*. In *Pearson*.
- Helfaya, A., & Moussa, T. (2017). Do Board's Corporate Social Responsibility Strategy and Orientation Influence Environmental Sustainability Disclosure? UK Evidence. *Business Strategy and the Environment*, 26(8). <https://doi.org/10.1002/bse.1960>
- Khan, H., Bose, S., Mollik, A. T., & Harun, H. (2020). “Green washing” or “authentic effort”? An empirical investigation of the quality of sustainability reporting by banks. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(2), 338–369. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2018-3330>
- Kurniawan, P. S., & Wahyuni, M. A. (2018). Factors Affecting Company's Capability in Performing Integrated Reporting: An Empirical Evidence From Indonesian Companies. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3315>
- Lock, I., & Seele, P. (2016). The credibility of CSR (corporate social responsibility) reports in Europe. Evidence from a quantitative content analysis in 11 countries. *Journal of Cleaner Production*, 122, 186–200. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.060>
- Mahoney, L. S., Thorne, L., Cecil, L., & LaGore, W. (2013). A research note on standalone corporate social responsibility reports: Signaling or greenwashing? *Critical Perspectives on Accounting*, 24(4–5), 350–359. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.09.008>
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management and Governance*, 16(3), 477–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>
- Michelon, G., Patten, D. M., & Romi, A. M. (2019). Creating Legitimacy for Sustainability Assurance Practices: Evidence from Sustainability Restatements. In *European Accounting Review* (Vol. 28). <https://doi.org/10.1080/09638180.2018.1469424>
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 59–78. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003>
- Nasution, R. M., & Adhariani, D. (2016). Simbolis Atau Substantif? Analisis Praktik Pelaporan Csr Dan Kualitas Pengungkapan (Symbolic Or Substantive? Analysis Of Csr Reporting Practices And The Quality Of Disclosure). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 23–51.
- Nugrahani, T. S., & Artanto, D. A. (2022). Sustainability Reporting By Disclosing Economic, Social And Environmental Performance. *Studies in Business and Economics*, 17(2), 216–226. <https://doi.org/10.2478/sbe-2022-0034>
- Nugrahani, T. S., Atiqoh, K. I., & Pertiwi, I. F. P. (2022). The Effect Of Industry Type, Government Pressure, And Company Size To Disclosure Of Sustainability Report. *Journal of Business and Management Review*, 3(1), 045–056. <https://doi.org/10.47153/jbmr31.3092022>

- OJK. (2017). *Lampiran II POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik*. Retrieved from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14639947.2011.564813><http://dx.doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605><https://doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605>http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/abaj102&div=144&start_page=26&collectio
- On, I. C. (2017). *FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS*. (April).
- Patten, D. M., & Zhao, N. (2014). Standalone CSR reporting by U.S. retail companies. *Accounting Forum*, 38(2). <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2014.01.002>
- Qisthi, F., & Fitri, M. (2020). Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) G4. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 469–484.
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>
- Trihatmoko, H., Ningsih, S., & Mubaraq, M. (2020). Standalone Report, assurance Report, GRI Reporting Framework dan Kualitas Pengungkapan Sustainability Report. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 142–156.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (pp. 1–110). pp. 1–110.
- Utama, S. (2011). An evaluation of support infrastructures for corporate responsibility reporting in Indonesia. *Asian Business and Management*, 10(3), 405–424. <https://doi.org/10.1057/abm.2011.10>
- Wong, R., & Millington, A. (2014). Corporate social disclosures: A user perspective on assurance. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 27(5). <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2013-1389>
- Wulandari, R. N. A., & Septiani, A. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Sustainability Disclosure. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 472–480.